

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjaga dan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terutama pada segmen kehidupan bermasyarakat adalah suatu hal yang menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Pada dewasa ini, menurut (Sari dan Sulistyowati, 2017) PHBS dianggap rendah pelaksanaannya dan sudah mulai terabaikan. Hal tersebut dibuktikan dengan rendahnya pelaksanaan promosi kesehatan di Puskesmas. Menurut WHO, capaian pelaksanaan PHBS dalam skala nasional hanya memiliki persentase sebesar 44%. Didalam pedoman PHBS dijelaskan bahwa pembinaan PHBS dilakukan dengan cara promosi kesehatan di Puskesmas secara optimal. Maka Pemerintah diharapkan dapat mengomunikasikan, mensosialisasikan, hingga mengaplikasikan program tersebut kepada masyarakat setempat. Akan tetapi pemerintah sendiri bukan tanpa halangan guna menyukseskan program tersebut, dalam kondisi ini kesadaran serta pola pikir masyarakat juga harus selaras dan sejalan dengan maksud, tujuan, serta upaya dari pemerintah itu sendiri agar program tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Menurut Departemen Kesehatan RI, Pemerintah memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar, bahwa PHBS ini termasuk kedalam sasaran strategis yang akan dicapai oleh Departemen Kesehatan itu sendiri. Disamping itu, Departemen Kesehatan RI berasumsi bahwa PHBS juga berkaitan dengan Program Indonesia Sehat yang dijadikan sebagai salah satu program dari agenda ke-5 Nawa Cita, yakni Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. Program kesehatan ini

direncanakan melalui Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2015-2019 dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.

Menurut (Lina, 2017), PHBS merupakan salah satu esensi serta hak asasi manusia guna tetap melangsungkan hidupnya. Hal ini sesuai dan telah dimuat didalam konstitusi World Health Organization (WHO) pada tahun 1948. Pemahaman tentang kesehatan menurut WHO ini juga dimuat didalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Kesehatan merupakan kondisi keadaan yang sehat baik secara fisik, mental, spiritual, serta sosial yang menjadikan seseorang dapat hidup secara baik dan layak. Kesehatan adalah hak mendasar bagi setiap insan manusia bahwa hak ini berlaku terhadap semua orang tanpa memandang dan membedakan suku, agama, ras, politik, hingga status sosial dan ekonomi. Tingkat kesehatan yang tinggi dapat diperoleh seseorang apabila ia dapat memperhatikan kesehatannya dengan baik. Menurut (Lina, 2017), disebutkan bahwa PHBS sendiri digolongkan kedalam lima golongan. Diantaranya yaitu PHBS di lingkungan sekolah, lingkungan rumah tangga, lingkungan institusi kesehatan, lingkungan tempat umum, dan lingkungan tempat kerja.

Menurut (Ningrum, 2013), dengan terlaksananya pembangunan pada bidang kesehatan khususnya PHBS tentunya akan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sehingga akan lahir masyarakat yang sehat, cerdas, aktif, dan produktif dengan membiasakan budaya PHBS. Sedangkan menurut (Purwatiningsih, 2008), Pemerintah secara skala nasional telah menyediakan media seperti Puskesmas, Posyandu, Hingga rumah sakit yang kiranya akan dapat

bersinergi dengan pemerintah setempat guna mensosialisasikan PHBS yang telah dirancang dengan sedemikian rupa. Selain berfungsi sebagai pintu pelayanan kesehatan, ketiga perangkat tersebut juga mestinya dapat berfungsi sebagai media sosialisasi program PHBS. Menurut (Nurhajati, 2015) PHBS memiliki banyak manfaat dari berbagai aspek. menerapkan PHBS pada kalangan rumah tangga diantaranya yaitu setiap anggota keluarga menjadi insan yang lebih sehat dan tidak mudah terserang penyakit, seorang anak dalam rumah tangga tersebut juga dapat tumbuh sehat dan cerdas, anggota keluarga dapat bekerja dengan giat sehingga kebutuhan keluarga dapat terpenuhi dan tercukupi tanpa ada halangan dari kesehatan setiap masing-masing anggota keluarga itu sendiri, pengeluaran biaya rumah tangga dapat dialokasikan untuk misi memenuhi gizi keluarga, pendidikan, bahkan dapat menambah pendapatan atau pemasukan untuk keluarga tersebut.

Kemudian apabila dilihat dari segi kemasyarakatan, manfaat dari PHBS yaitu masyarakat dapat mengupayakan kehidupan lingkungan yang lebih sehat, masyarakat dapat mencegah serta mengatasi beberapa masalah kesehatan, masyarakat juga dapat mengembangkan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKBM). Dalam pengaplikasiannya, PHBS perlu mendapatkan perhatian langsung dari Pemerintah, khususnya dari Dinas Kesehatan di Kabupaten Klaten itu sendiri. Sedangkan apabila berbicara sebaliknya, menurut (Hadi, 2017) salah satu akibat yang ditimbulkan apabila tidak menerapkan PHBS dalam kehidupan bermasyarakat, kemungkinan terburuknya adalah munculnya kehidupan bermasyarakat yang tidak sehat atau menderita penyakit. Dikarenakan PHBS identik dengan dengan program *Open Defecation Free* (ODF) atau bisa disebut dengan stop buang air besar sembarangan, ODF juga saling berkaitan agar senantiasa

menjaga penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan agar dapat terciptanya lingkungan hidup yang bersih dan sehat sehingga seluruh elemen masyarakat dapat terhindar dari mara bahaya penyakit.

Dengan melalui proses interaksi, informasi, komunikasi, dan sosialisasi maka akan membangun proses komunikasi yang akan menghasilkan sebuah dampak penguatan dan akan diterapkan dikalangan masyarakat. Sehingga masyarakat dapat terbiasa dengan perilaku PHBS. Didalam kasus ini pada dasarnya program ini telah digencarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten telah bekerja sama atau berafiliasi dengan pihak Puskesmas Kecamatan Polanharjo. Namun kendala yang ditemui adalah bahwasanya tingkat kesadaran masyarakat di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten masih tergolong cukup rendah. Permasalahan yang cukup menarik yang ada di Kecamatan Polanharjo yaitu dari 18 desa yang ada di Kecamatan Polanharjo ditinjau dari aplikasi SMART-STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan RI menunjukkan hanya 3 desa yang sudah menggerakkan ODF secara maksimal atau bisa juga disebut stop buang air besar sembarangan. 3 desa ini antara lain desa Jimus, Keprabon, dan Kebonharjo. Aplikasi ini adapat diunduh melalui *Google Playstore* ataupun *Apple App Store*. Kondisi ini tentunya menjadi sebuah pekerjaan besar bagi Pemerintah terkait agar pelaksanaan PHBS ini dapat berjalan dengan baik dan semestinya. Berikut akan diuraikan tabel terkait persentase akses sanitasi yang telah dilakukan di setiap desa di Kecamatan Polanharjo:

Tabel 1.1
Presentase Akses Sanitasi ODF (*Open Defecation Free*)

No	Nama Desa	Presentase Akses Sanitasi
1	Kebonharjo	100%
2	Jimus	100%
3	Keprabon	100%
4	Karanglo	95,77%
5	Kapungan	91,74%
6	Ponggok	90,43%
7	Turus	82,13%
8	Ngaran	82,03%
9	Nganjat	81,88%
10	Janti	81,67%
11	Kauman	80,63%
12	Kranggan	80,43%
13	Borongon	79,85%
14	Glagah Wangi	79,79%
15	Polan	79,76%
16	Sidoharjo	77,04%
17	Wangen	76,18%
18	Sidowayah	70,86%

Sumber: Aplikasi STBM SMART 2018

Tabel tersebut menjelaskan tingkatan presentase bahwa sejauh mana beberapa desa yang berada di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten dalam memenuhi kriteria desa dengan status ODF. Semakin tinggi presentasinya, menunjukkan bahwa Desa tersebut semakin baik dengan predikat ODF. Merujuk kepada data di atas, Desa Kebonharjo, Desa Jimus, dan Desa Keprabon menjadi Desa dengan predikat akses sanitasi ODF yang terbaik di Kecamatan Polanharjo yakni dengan tingkat presentase sebesar 100%.

Sebagai gambaran, menurut (Ambarwati, 2016) ODF merupakan kondisi ketika seseorang atau komunitas tidak lagi melakukan buang air besar sembarangan yang biasanya berakibat dengan tersebarnya penyakit yang berhubungan dengan kebersihan dan sanitasi. ODF menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan

pelaksanaan PHBS di suatu lokasi atau daerah, khususnya di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Melihat kondisi yang demikian, dilansir dari website http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KAB_KOTA_2015/3310_Jateng_Kab_Klaten_2015, di Kabupaten Klaten sendiri sejumlah 162.807 rumah tangga dinyatakan telah menerapkan PHBS dari sekitar 181.124 jumlah rumah tangga yang sudah dipantau oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dengan persentase keberhasilan sebesar 89,9%. Pelaksanaan dan peran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten yaitu antara lain; pertemuan fasilitasi, pertemuan dalam rangka penyusunan standarisasi PHBS, Rencana Tindak Lanjut (RTL), pembinaan dan monitoring PHBS, promosi kesehatan melalui media elektronik dengan materi program-program prioritas/pencegahan dan pemberantasan penyakit yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan penyakit yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar masyarakat mempunyai kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, dan pemberian stimulan sebagai sarana percontohan untuk dikembangkan. Akan tetapi dalam realitanya, menurut hasil wawancara penulis kepada salah satu petugas Puskesmas Kecamatan Polanharjo. Berikut merupakan kutipan wawancara tersebut:

“Ibu Atik selaku petugas Puskesmas Kecamatan Polanharjo mengatakan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dalam mensosialisasikan dan mengkomunikasikan PHBS di Kecamatan Polanharjo memang sudah berjalan tetapi mendapat respon yang kurang baik dari masyarakat yaitu kurangnya partisipasi masyarakat setempat dikarenakan masyarakat banyak yang masih belum mengetahui apa itu PHBS” (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 8 januari 2019 pukul 15.00 WIB).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dalam mensosialisasikan PHBS di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten pada tahun 2018?

2. Bagaimana bentuk dari sosialisasi dan komunikasi dari penerapan PHBS di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten pada tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa peran dalam bentuk komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten tentang PHBS kepada masyarakat di Kecamatan Polanharjo. Dan juga mengetahui model atau bentuk sosialisasi dan komunikasi PHBS dalam penerapannya di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten.

D. Manfaat Penelitian

1.1.1 Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini antara lain yaitu Untuk memahami serta mendalami peran, strategi, dan upaya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten tentang penyuluhan, sosialisasi, dan komunikasi PHBS di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. Kemudian penelitian ini juga dapat digunakan sebagai Sebagai salah satu bahan evaluasi bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten ataupun digunakan untuk penelitian berikutnya yang kemungkinan akan serupa dengan penelitian ini.

1.1.2 Manfaat Praktis

Terdapat beberapa manfaat untuk berbagai pihak diantaranya yaitu:

- a. Manfaat bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan untuk mensukseskan upaya komunikasi dan sosialisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten.

b. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian dimaksudkan bahwa pola pikir masyarakat dibutuhkan untuk mensukseskan program dan misi dari Pemerintah itu sendiri yaitu penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. Serta masyarakat dapat memonitoring upaya dan strategi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.

c. Manfaat bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa, penelitian bermanfaat untuk mengetahui peran komunikasi dan sosialisasi dari Pemerintah ataupun Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dan keikutsertaan masyarakat di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten sehingga mahasiswa dapat menyikapi hal tersebut secara kritis berdasarkan kepada penelitian ini.

E. Tinjauan Pustaka

Tabel 1.2
Daftar Tinjauan Pustaka

No	Judul	Penulis	Isi
1	PHBS Siswa di SDN 42 Korong Gadang Kecamatan Kuranji Padang	Henico Putri Lina (Jurnal Promkes, Vol. 4, No.1, Edisi Juli 2017)	pengetahuan terhadap penggunaan jamban bersih dan sehat hanya sebesar 67,6%, kemudian sebesar 56,3% siswa bersikap tidak menerima untuk melakukan jajan sehat di kantin sekolah, dan sebanyak 100% siswa tidak melaksanakan jajan sehat di kantin sekolah tersebut.
2	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Masyarakat Desa Samir dalam Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	Nunun Nurhajati (Jurnal Publicana, Vol. 8, No. 1, Edisi 2015)	PHBS merupakan sebuah perilaku kesehatan yang dilakukan dengan kesadaran. Sehingga anggota keluarga dapat menolong dirinya sendiri dengan kesadaran akan PHBS yang sudah dimilikinya. Mengacu kepada 10 indikator, hasil penelitian di Desa Samir memiliki 7 indikator yang telah memenuhi target (diatas 70%) diantaranya yaitu: pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, menimbang balita setiap bulannya, tersedianya air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan juga sabun, tersedianya jamban sehat, memberantas jentik nyamuk, dan melakukan aktifitas fisik setiap harinya.
3	Hubungan Tingkat Pengetahuan Sehat-Sakit Dengan Sikap Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta Tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Fakhrudin Nasrul Sani (Jurnal Kesmadaska, Vol. 2 No. 2, Edisi Juli 2011)	PHBS merupakan upaya untuk membantu masyarakat agar mengenali dan mengetahui permasalahan dalam tatanan rumah tang sehingga dapat menerapkan cara hidup sehat dengan maksud menjaga, memelihara, serta meningkatkan kesehatannya dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemauan sehingga masyarakat mampu untuk menerapkan hidup bersih dan sehat dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan

			derajat kesehatan yang baik dan optimal.
4	Hubungan Pendidikan dan Penghasilan dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Tati Ruhmawati (Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia, Vol. 12, No. 1, Edisi November 2013)	PHBS merupakan budaya hidup perseorangan, keluarga, dan masyarakat yang memiliki orientasi kearah sehat dengan maksud untuk meningkatkan serta memelihara kesehatannya dari segi fisik, mental hingga sosial. Kondisi sehat tersebut dapat diraih dengan mengubah perilaku atau kebiasaan yang tidak sehat menjadi perilaku yang jauh lebih sehat dan menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih.
5	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Serta Perilaku Gizi Seimbang Ibu Kaitannya Dengan Status Gizi dan Kesehatan Balita di Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur'	Linda Dwi Jayanti, Yekti Hartati Effendi, Dadang Sukandar (Jurnal Gizi dan Pangan, Vol. 6, No. 3, Edisi 2011)	Status Gizi dan Kesehatan Balita di Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur' dikatakan bahwa penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengetahuan gizi, PHBS, diet seimbang pada perilaku Ibu, dan hubungannya dengan status gizi dan kesehatan balita. Didalam penelitian ini terdapat 55 balita sebagai sampel yang menunjukkan bahwa pengetahuan gizi seorang ibu berhubungan dengan PHBS.
6	Gambaran Karakteristik Keluarga Tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Pada Tatanan Rumah Tangga di Desa Karangasem Wilayah Kerja Puskesmas Tanon II Sragen	Erna Irnawati (Gaster: Jurnal Kesehatan, Vol. 8, No. 2, Edisi 2011)	Keluarga merupakan sebuah unit pelayanan dikarenakan kesehatan keluarga yang saling berkaitan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang ada di Indonesia, hanya sebanyak kurang dari 10% masyarakat yang berperilaku secara bersih dan sehat dalam kebiasaan sehari-hari. Didalam penelitian ini dikatakan bahwa pengetahuan seseorang tentang PHBS dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu: pendidikan, pekerjaan, dan umur.
7	Perbedaan Pengetahuan dan Sikap Perilaku Hidup Bersih	Zulfa Husni Khumayra, Madya Sulisno (Jurnal	Lingkungan pesantren juga rawan terhadap ancaman berbagai macam penyakit menular yang

	dan Sehat Antara Santri Putra dan Santri Putri	Keperawatan Diponegoro, Vol. 1, No. 1, Edisi 2012)	disebabkan karena kepadatan lingkungan yang tidak layak. Maka menanamkan PHBS menjadi sebuah anjuran. Didalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan tentang PHBS antara santri laki-laki dengan santri perempuan tidak terpaut jauh yaitu sekitar $p = 0,267$ ($p > 0,05$).
8	Pelaksanaan Program UKS Dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang	Erlisa Candrawati, Esti Widiani (Care: Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan, Vol 3, No.1 Edisi 2015)	UKS merupakan sebuah tolak ukur pemberdayaan mesyarakat di lingkungan sekolah dalam menunjang berperilaku bersih dan sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara pelaksanaan program UKS dengan PHBS siswa SD di Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang. Program PHBS dan UKS di SD Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang kebanyakan sudah tergolong baik dengan persentase pelaksanaan PHBS dan UKS diatas 80% dengan keeratan hubungan yang signifikan (dengan $p=0.014$)
9	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Pada Masyarakat Using di Kabupaten Banyuwangi	Husni Abdul Gani (Jurnal IKESMA, Vol. 9, No. 2, Edisi 2013)	PHBS merupakan sebuah wujud paradigma kesehatan pada budaya seseorang. Hasilnya menunjukkan bahwa jumlah responden laki-laki yang berusia diatas 50 tahun memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah (Sekolah Dasar) dan mayoritas berprofesi sebagai petani dengan perilaku penggunaan jamban sehat sebesar 54%, penggunaan jamban kurang sehat 37%, dan penggunaan jamban sehat yang buruk 9%. Kemudian perilaku responden yang peduli terhadap sampah sebesar 37% dan yang tidak peduli terhadap sampah sebesar 63%.
10	Gambaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Sekolah Pada Siswa Kelas Akselerasi di SMPN 8 Manado	Mohammad Julrisam Gomo, Jootje M. L. Umboh, A. J.	PHBS merupakan program pemerintah yang dikeluarkan pada tahun 2006 yang bertujuan untuk mengubah kebiasaan masyarakat

		<p>Pandelaki (Jurnal e-Biomedik, Vol 1, No. 1, Edisi 2013)</p>	<p>yang tidak sehat agar menjadi lebih sehat. Didalam penelitian ini terdapat 8 indikator yaitu diantaranya: mencuci tangan dengan sabun, menggunakan jamban bersih dan sehat, olahraga teratur, pemberantasan jentik nyamuk, tidak merokok disekolah, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan, dan membuang sampah pada tempatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaplikasian PHBS siswa akselerasi SMPN 8 Manado. Hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan PHBS siswa SMPN 8 Manado tergolong baik. Dimana 90,4% siswa sudah mengetahui apa itu PHBS sekolah. Sebanyak 89% siswa menyatakan setuju terhadap PHBS sekolah dengan persentase sebesar 68% siswa SMPN 8 Manado mempraktekan pengetahuan mereka tentang PHBS.</p>
--	--	--	--

Berdasarkan penelitian yang dijadikan acuan, sebanyak 5 penelitian membahas tentang pengetahuan PHBS di kalangan sekolah dan universitas dengan konsentrasinya terhadap menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga kebersihan terhadap diri sendiri. Dan hasilnya menunjukkan bahwa PHBS tersebut sudah diaplikasikan dengan baik. Kemudian sebanyak 5 penelitian membahas tentang pengetahuan PHBS di kalangan masyarakat dengan fokusnya terhadap menjaga kesehatan tatanan rumah tangga dan kebersihan lingkungan. Namun pada kalangan masyarakat masih banyak ditemui kurangnya bentuk kesadaran terhadap PHBS dikarenakan rendah nya pendidikan serta pengetahuan tentang PHBS. Sedangkan

fokus pada penelitian ini adalah peran dalam bentuk sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.

F. Kerangka Teori

a. Peran

Dalam mengimplementasikan program PHBS, peran Pemerintah tentu saja menjadi hal yang paling utama dalam menentukan keberhasilan rencana dan rancangan tersebut. Menurut (Retnaningsih, 2007) yaitu dengan adanya beberapa indikator seperti kebijakan, program, kegiatan dan pelaksanaan. Poin kebijakan yang dimaksud adalah bagaimana peran pemerintah dalam merancang program PHBS secara baik agar nilai serta tujuan dari kebijakan tersebut dapat tersampaikan kepada masyarakat yang menjadi sarannya. Kemudian hadirnya program juga menjadi suksesor kebijakan tersebut. Dengan dirancang dan diluncurkannya program khususnya yaitu program PHBS akan menjadi sebuah poin pendukung dalam melakukan sebuah kebijakan. Kemudian juga adanya kegiatan yang bertujuan untuk mengimplementasikan kebijakan dan proyek dari PHBS itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah adanya pelaksanaan. Dengan adanya pelaksanaan maka kebijakan, program, dan kegiatan poin pelaksanaan akan lebih jelas dalam segi arah dan perencanaannya secara berkelanjutan.

Menurut (Suhardono, 2016) Peran dapat jelaskan melalui beberapa pemahaman dan cara, yang pertama yaitu dimana konsep peran yang muncul dari kalangan drama dan teater pada masa Yunani kuno atau Romawi. Peran merujuk kepada karakter yang disandang oleh seorang pemeran sebuah pentas drama. Kemudian yang kedua peran diartikan terhadap konotasi ilmu sosial yang diartikan sebagai sebuah fungsi yang dibawakan oleh seseorang ketika

sedang menyanggah predikat suatu posisi didalam struktur sosial. Lalu yang ketiga peran adalah hubungan antara pelaku dengan lawan mainnya dan bersifat saling terkait dan melengkapi satu sama lain. Pengaplikasian peran didalam penelitian ini terdapat kedalam beberapa bentuk yang nantinya akan diaplikasikan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah sebagai actor utamanya.

Menurut (Salaa, 2015) peran merupakan sebuah aspek dinamis yang timbul dari sebuah status. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Soekamto bahwa seseorang harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan orang tersebut dan terjadilah sebuah peranan. Peran seringkali merujuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan juga sebagai suatu proses tertentu. Peran juga memiliki beberapa indikator diantaranya adanya kebijakan, program, pelaksanaan, dan kegiatan. Sedangkan menurut (Faozan, 2010) Peran adalah suatu pola sikap, nilai serta tujuan yang ada pada diri seseorang berdasarkan kepada posisinya di kalangan masyarakat. Posisi ini merupakan bentuk identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam sebuah sistem sosial dan juga merupakan bentuk perwujudan aktualisasi diri. Apabila ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.

Mengacu kepada pendapat yang dikemukakan oleh C. P. Chaplin, peran dianggap sebagai fungsi individu didalam suatu kelompok atau institusi. Peran juga dapat dikatakan sebagai fungsi atau tingkah laku yang diharapkan ada pada seseorang yang menjadi ciri atau sifat dari dalam dirinya. Dengan artian bahwa

teori peran sebagai sebuah pola sikap, nilai, dan juga tujuan didalam diri seseorang yang ditujukan outputnya kepada masyarakat adalah teori yang sangat relevan dengan penelitian ini. Jadi berdasarkan pendapat dari Faozan dapat disimpulkan bahwa peran merupakan sebuah sikap yang memiliki nilai dan juga tujuan yang terletak pada diri seseorang yang berdasarkan kepada posisinya dikalangan masyarakat. Menurut (Buluamang, 2017) bentuk pengaplikasian dari peran tersebut terbentuk kedalam sosialisasi, komunikasi, dan kebijakan publik. Untuk bentuk penjabaran sosialisasi adalah sebagai berikut:

a. Sosialisasi

Kredibilitas kepemimpinan juga dapat ditentukan melalui tingkat sosialisasi yang ditunjukkan. Perilaku sosialisasi seorang pemimpin atau kepala daerah harus memiliki kesesuaian dengan citra dan ekspektasi publik. Sosialisasi sendiri dibagi menjadi 2 jenis yaitu sosialisasi formal dan sosialisasi informal. Sosialisasi formal sendiri sosialisasi yang biasanya dilakukan oleh sebuah lembaga atau instansi tertentu yang mengacu kepada ketetapan dari lembaga atau instansi itu sendiri dan dibentuk oleh peraturan yang berlaku, sedangkan sosialisasi informal timbul dari sifat kekeluargaan dan sifatnya tidak resmi. Sosialisasi formal biasanya lahir dari lembaga-lembaga negara atau pemerintahan sedangkan sosialisasi informal muncul dari kalangan keluarga atau kerabat dari individu (Djuyandi, 2014). Pada dasarnya keluarga merupakan agen sosialisasi yang utama bagi seseorang dikarenakan keluarga menjadi bagian dari proses pembentukan orientasi

sosialisasi individu terhadap individu lainnya, akan tetapi lembaga juga memiliki peran dalam sosialisasi. Contoh dari lembaga tersebut adalah sekolah dan media massa. Dengan demikian sosialisasi formal dan informal dapat dikatakan bahwa memiliki koneksi yang kuat dalam membentuk sosialisasi terhadap seseorang (Solihat, 2008). Menurut (Aprilia, 2009) sosialisasi merupakan bentuk publikasi program, kebijakan, dan aturan dari pencetus program, kebijakan, dan peraturan yang ditujukan kepada pihak tertentu yaitu masyarakat. Sosialisasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang dapat mengubah *mindset* dikalangan sasaran atau target yang dijadikan lahan untuk sosialisasi tersebut sehingga pihak yang mencari sasaran dengan yang menjadi sasaran dapat berjalan selaras dan beriringan sehingga tercipta kerjasama atau menjadi mitra kerja yang baik.

Sedangkan menurut (Sartika, 2015), pelaku sosialisasi dapat dilakukan oleh pribadi dan instansi atau lembaga baik lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta. Untuk media sosialisasi, terdapat beberapa tujuan untuk penyebaran sosialisasi itu sendiri seperti keluarga, kelompok bermain, sekolah, lingkungan kerja, dan media massa. Kemudian untuk mewujudkan sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui media massa dan penyuluhan. Sedangkan menurut (Anggraini, 2015) Sosialisasi merupakan suatu proses dimana anggota, elemen masyarakat atau keluarga baru yang sedang mempelajari norma atau kebudayaan ditempat dimana ia tunggal menjadi anggotanya.

Untuk penjelasan terkait pelaksanaan komunikasi, menurut (Buluamang, 2018) adalah sebagai berikut:

b. Komunikasi

Perilaku Komunikasi ialah suatu tindakan ketika penyampaian pesan baik itu komunikasi verbal ataupun komunikasi non-verbal. Komunikasi juga diartikan sebagai tindakan seseorang didalam lingkungan dan situasi komunikasinya. Komunikasi adalah sebuah bentuk tindak lanjut dari proses sosialisasi yang telah dilakukan yang disampaikan dalam bentuk informasi, aspirasi dan juga sebagai media penghubung antara pihak yang terkait. Menurut (Wijaya, 2013) komunikasi memiliki empat jenis yaitu komunikasi intrapersonal dimana komunikasi yang terjadi pada diri sendiri, komunikasi interpersonal yang terjadi pada orang lain, komunikasi kelompok yang terjadi kepada kelompok yang jumlahnya lebih dari dua orang, dan komunikasi massa yang biasanya dilakukan melalui media massa. Dari beberapa elemen komunikasi tersebut memunculkan sebuah konklusi bahwa efektivitas komunikasi akan tercapai apabila dapat melahirkan kesamaan kepentingan antara komunikator dan komunikan, sikap saling mendukung, sifat keterbukaan, dan saling menerima informasi sebagai sesuatu yang bermanfaat. Komunikasi sendiri memiliki berbagai macam tujuan diantaranya yaitu dapat mengubah sikap, mengubah opini, mengubah kebiasaan, hingga mengubah pandangan. Komunikasi juga memiliki dua klasifikasi sifat yaitu komunikasi verbal dan non verbal dimana untuk komunikasi verbal terdiri dari komunikasi lisan dan

komunikasi tulisan, sedangkan komunikasi non verbal terdiri dari komunikasi tubuh dan komunikasi grafis atau gambar. Menurut (Sartika, 2015), komunikasi merupakan proses pernyataan yang dilakukan oleh manusia dan dinyatakan dalam bentuk pikiran dan perasaan yang ditujukan kepada orang dengan menggunakan Bahasa sebagai media atau alat penyampaiannya. Apabila dilihat dari perspektif mekanis, proses komunikasi ini terjadi ketika seorang komunikator mengirimkan pesan kepada seorang komunikan serta penerimaan isi dari komunikasi ini diterima oleh alat indera manusia.

Komunikasi juga memiliki beberapa hambatan dan terbagi dalam dua jenis yaitu dalam bentuk prasangka dan gangguan. Hambatan dalam bentuk gangguan terbagi lagi menjadi dua klasifikasi yaitu *mechanical noise* dan *semantic noise*. Teknik komunikasi juga memiliki strategi agar proses dari komunikasi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dalam proses penyebarluasan komunikasi perlu diterapkan sifat informative, persuasive, dan instruktif secara sistematis kepada komunikan atau sasaran komunikasi agar hasil yang diperoleh dapat menjadi optimal. Kemudian dapat menghubungkan *cultural gap* (perbedaan kultur) sehingga komunikator dapat memanfaatkan media massa sebagai alat bantu yang optimal.

Untuk melakukan komunikasi yang baik, harus melewati beberapa tahapan agar proses komunikasi ini berjalan dengan baik diantaranya yaitu seperti; pemilihan komunikan dimana seorang komunikator harus dapat mengidentifikasi komunikannya dengan baik, kemudian

penyusunan pesan yang akan disampaikan juga hal wajib yang harus diperhatikan agar sesuai norma-norma yang berlaku dan tidak menimbulkan *crash* di kalangan masyarakat yang menjadi sasaran atau target, hingga penggunaan media yang tepat, frekuensi penyampaian, dan waktu serta lokasi yang tepat sasaran.

Menurut (Suprpto, 2009) komunikasi merupakan sebuah proses yang menunjukkan bahwa siapa yang mengatakan apa, dengan cara apa, kepada siapa, dan dengan efek apa. Komunikasi juga digambarkan sebagai sebuah proses pengalihan informasi dari seseorang kepada orang lain dengan suatu maksud tertentu. Komunikasi dikondisikan dengan proses yang melibatkan seseorang untuk menggunakan tanda atau isyarat verbal maupun nonverbal secara sadar atau tidak sadar yang berguna untuk memengaruhi sikap orang lain.

Menurut (Rahardjo, 2009) komunikasi secara konseptual dalam bentuk retorika bahwa komunikasi diteorikan sebagai sebuah seni wacana praktis. Persoalan komunikasi diteorikan sebagai sebuah urgensi sosial yang mempersyaratkan pertimbangan kolektif secara mendalam. Kemudian dapat disimpulkan bahwa pernyataan dari Sartika yang berbunyi komunikasi adalah bentuk pernyataan yang dilakukan oleh seorang manusia dan dinyatakan dalam bentuk pikiran serta perasaan dan ditujukan kepada orang dengan menggunakan Bahasa sebagai media atau alat penyampaiannya. Dan ditinjau dari perspektif mekanis, proses komunikasi ini terjadi ketika seorang komunikator

mengirimkan pesan kepada seorang komunikan serta penerimaan isi dari komunikasi ini diterima oleh alat indera manusia.

c. Kebijakan Publik

Kebijakan memiliki sebuah peranan penting dalam menerapkan sebuah tujuan, program, sosialisasi, komunikasi, keputusan, hingga sebuah rancangan yang biasanya telah diatur dan ditetapkan oleh pejabat tertentu ataupun Pemerintah terkait yang kelak nantinya akan diimplementasikan kepada publik atau masyarakat. Sedangkan menurut (Tahir, 2014) kebijakan publik sendiri merupakan sebuah konsep yang dijadikan landasan dalam melaksanakan sebuah pekerjaan dan proses kepemimpinan. Hal ini tentu erat kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang akan dituangkan kedalam berbagai bentuk peraturan. Amara Rakasataya mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah perencanaan yang diarahkan guna mencapai suatu tujuan yang memuat 3 tiga elemen yang diantaranya yaitu mengidentifikasi tujuan yang hendak dicapai, strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan penyediaan berbagai input untuk merealisasikan pelaksanaan dalam bentuk aksi nyata yang bersumber dari strategi itu sendiri (Suwitri, 2008).

Sedangkan menurut (Anggara, 2014) kebijakan publik diartikan sebagai sebuah bentuk ketegasan pemerintah apakah pemerintah harus melakukan sesuatu atau tidak. Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka dapat dipastikan sesuatu tersebut memiliki sebuah tujuan tertentu, apabila pemerintah memilih untuk tidak

melakukan sesuatu, hal tersebut juga merupakan sebuah bentuk kebijakan publik yang memiliki tujuan dan makna tersendiri.

Menurut (Tahir, 2014), kebijakan publik memiliki 3 kelompok tingkatan diantaranya yaitu kebijakan publik yang bersifat umum dan mendasar, kebijakan publik yang bersifat menengah, dan kebijakan publik yang bersifat mikro. Untuk contoh dari kebijakan publik yang bersifat umum diantaranya yaitu seperti UUD 1945, Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres, dan Perda. Kemudian untuk contoh dari kebijakan publik bersifat menengah yaitu seperti Peraturan Menteri, Pergub, Peraturan Bupati atau Walikota. Lalu untuk contoh dari kebijakana publik mikro adalah peraturan yang diedarkan oleh aparatur publik yang berada dibawah Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Kebijakan publik juga memiliki lima komponen yaitu tujuan yang diharapkan, perencanaan spesifik, program, keputusan, dan efek atau akibat dari diluncurkannya sebuah program. Didalam proses terjadinya kebijakan publik terdapat beberapa tahapan yaitu mengidentifikasi kebutuhan dalam pembangunan, formulasi kebijakan, cakupan analisa uji kelayakan politik, pelaksanaan program, dan evaluasi terkait metode tersebut. Adanya pengarahan kebijakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tertentu dan pelaksanaan kebijakan yang ditopang oleh masyarakat maka diantara kedua proses tersebut akan tercipta sebuah skema sosialisasi dan komunikasi agar penyampaian kebijakan tersebut dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Tujuan kebijakan publik sendiri ialah sebuah tindakan pemerintah yang diciptakan untuk meraih hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Kebijakan publik adalah sebuah tindakan yang legal dikarenakan dibuat oleh lembaga atau instansi yang memiliki legitimasi dalam pemerintahan. Sedangkan jenis dari kebijakan publik diantaranya adalah kebijakan substantif dan procedural, kebijakan distribusi dan regulasi, kebijakan material, dan *public goods and private goods policies*. (Anggara, 2014). Menurut (Afriyanti dan Subowo, 2017) Hal ini berkaitan dengan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) yang harus diteruskan oleh pemberi kebijakan kepada sasaran dari kebijakan itu sendiri. Pemberi kebijakan harus mampu menyampaikan KIE terhadap penerima kebijakan yang dimana bentuk dari KIE itu sendiri adalah sosialisasi dan komunikasi. Pemberian KIE tersebut berhubungan dengan siapa saja pihak yang memberikan KIE, mulai dari seperti pihak yang memberikan KIE, tingkat intensitas yang menyampaikan KIE, metode penyampaian KIE, hingga materi apa saja yang diberikan dalam kaitannya dengan KIE.

Menurut (Desiana dkk, 2016), didalam penerapan KIE, pemerintah sebagai penentu kebijakan melakukan metode komunikasi persuasif (*lobbying*) yang akan melahirkan kebijakan publik ataupun peraturan yang nantinya akan kepada kader-kader tertentu dan masyarakat sehingga timbul sebuah koalisi ataupun jaringan kerja yang baik. Dari penerapan KIE tersebut juga dapat ditarik didalam model implementasi

kebijakan. Menurut (Akib & Tarigan, 2008) terdapat dua macam yang berjalan didalam tahapan implementasi kebijakan diantaranya yaitu *top down* dan *bottom up*. Kedua jenis macam tersebut ada didalam setiap proses pembuatan kebijakan. Untuk tipe *top down*, terdapat model elit dan model proses didalamnya. Sedangkan untuk tipe *bottom up* terlihat pada model kelompok dan model kelembagaan. Dalam menilai kriteria implementasi kebijakan tersebut terdapat tiga indikator, yaitu: (1) tingkat kepatuhan birokrasi, (2) adanya aktivitas rutin yang tidak bermasalah, dan (3) manfaat dan dampak dari program yang dikehendaki. Maka peran pemerintah dalam menjalankan KIE dinilai memiliki posisi yang krusial dikarenakan segala sesuatu yang hendak dikomunikasikan dan disosialisasikan akan memerlukan KIE sebagai indikator keberhasilan dari sosialisasi dan komunikasi itu sendiri.

b. Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

PHBS adalah sebuah *behaviour* atau perilaku yang berguna untuk *changing the habit* masyarakat tertentu agar mengarah kepada kualitas kehidupan yang lebih berkualitas. Perilaku ini tentu saja perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah untuk menjamin masyarakatnya dapat tumbuh dengan kebersihan dan kesehatan yang baik. Menurut (Pramono & Paramita, 2011) PHBS juga memiliki 10 jenis indikator diantaranya yaitu ibu hamil yang rutin memeriksakan kandungannya kepada tenaga kesehatan, bayi yang diimunisasi dan ditimbang secara rutin, keluarga yang mengonsumsi makanan bergizi, keluarga sudah buang air besar di jamban,

keluarga yang sudah menggunakan air bersih untuk keperluan sanitasi, keluarga yang membersihkan sampah di lingkungan hidupnya, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan menggunakan sabun, tidak ada anggota keluarga yang merokok, sadar akan bahaya HIV/AIDS, dan mengikuti program JPKM Departemen Kesehatan RI. PHBS disebut sebagai wadah untuk seseorang dalam edukasi dan komunikasi sikap perilaku hidup bersih dan sehat yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat. Menurut (Amalia, 2009) PHBS ialah suatu bentuk upaya guna memberikan pengalaman ataupun melahirkan kondisi untuk individu, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat dengan menggunakan komunikasi ataupun sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, serta perilaku dengan pendekatan, *social support*, hingga pemberdayaan masyarakat maka akan tercipta dan dapat diterapkan bagaimana agar hidup dengan sehat dalam rangka menjaga dan memelihara kesehatan. PHBS bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pengetahuan agar masyarakat dapat memiliki pola hidup yang sehat agar dapat menaikkan standar kualitas hidup yang lebih baik. PHBS dalam kehidupan bermasyarakat dalam tata kelola lingkungan memiliki beberapa indikator. Diantaranya yaitu seperti terdapatnya jamban serta penggunaan dan pemeliharannya, air bersih dan pemanfaatannya untuk kesehatan, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) lengkap dengan pengelolaannya, saluran pembuangan air limbah, ventilasi, kepadatan penghuni, dan lantai dari tempat hunian warga yang bukan tanah.

Menurut (Sani, 2011) PHBS merupakan upaya untuk membantu masyarakat agar mengenali dan mengetahui permasalahan dalam tatanan

rumah tang sehingga dapat menerapkan cara hidup sehat dengan maksud menjaga, memelihara, serta meningkatkan kesehatannya dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemauan sehingga masyarakat mampu untuk menerapkan hidup bersih dan sehat dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan derajat kesehatan yang baik dan optimal.

Menurut (Menurut Ruhmawati & Sukandar, 2013) PHBS merupakan budaya hidup perseorangan, keluarga, dan masyarakat yang memiliki orientasi kearah sehat dengan maksud untuk meningkatkan serta memelihara kesehatannya dari segi fisik, mental hingga sosial. Kondisi sehat tersebut dapat diraih dengan mengubah perilaku atau kebiasaan yang tidak sehat menjadi perilaku yang jauh lebih sehat dan menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. Maka pernyataan yang dikemukakan oleh Sani yaitu tentang bagaimana PHBS menjadi sebuah upaya untuk membantu masyarakat agar mengenali dan mengetahui permasalahan dalam tatanan rumah tangga sehingga dapat menerapkan cara hidup sehat dengan maksud menjaga, memelihara, serta meningkatkan kesehatannya dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemauan sehingga masyarakat mampu untuk menerapkan hidup bersih dan sehat dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan derajat kesehatan yang baik dan optimal.

G. Definisi Konseptual

1.1.3 Peran Dinas

Peran Dinas merupakan sebuah bentuk atau sebuah usaha antara dua pihak atau lebih yaitu pihak Dinas dengan pihak lain dengan maksud atau tujuan untuk memiliki pola berpikir atau kerangka berpikir yang selaras.

1.1.4 Sosialisasi

Sosialisasi merupakan salah satu upaya untuk memberikan sebuah aspek pembelajaran dari sosialisator terhadap pihak yang disosialisasikan.

1.1.5 Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu bentuk pendekatan terhadap seseorang atau lembaga yang bertujuan untuk terciptanya hubungan yang harmonis dan selaras.

1.1.6 Program PHBS

Program PHBS adalah sebuah usaha dan upaya untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik dan sehat dan higienis kemudian juga untuk mencapai kehidupan yang sehat diperlukan pola hidup yang menjaga dan menjunjung tinggi kebersihan.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional didalam sebuah penelitian ditujukan untuk memahami secara mendalam sebuah penelitian, akan lebih mudah dipahami apabila dicurahkan dalam indikator-indikator tertentu sehingga tidak terjadi sebuah kesalahpahaman dalam sebuah penelitian khususnya dengan judul dari penelitian ini yaitu “Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Dalam Sosialisasi dan Komunikasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Kecamatan

Polanharjo Kabupaten Klaten Tahun 2018”. Berikut penjabaran definisi operasional yang dimaksud:

Tabel 1.3
Daftar Tabel Definisi Operasional

Teori	Indikator	Parameter
Peran	<p>1. Kebijakan dalam merancang program PHBS</p> <p>2. Program terkait PHBS yang direncanakan dan akan dirilis</p> <p>3. Kegiatan yang dilakukan dalam mengimplementasikan proyek rancangan program PHBS</p>	<p>1. Tersusun nya kebijakan terkait program PHBS yang dirancang sehingga dapat diimplementasikan kepada masyarakat.</p> <p>2. Kebijakan terkait program PHBS dapat disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat di Kecamatan Polanharjo khususnya Desa Keprabon dan Sidowayah.</p> <p>1. Program yang disusun dapat diaplikasikan secara layak sehingga tujuan dan nilai dari program tersebut dalam diimplementasikan dengan baik.</p> <p>2. Program tersebut dapat difungsikan sebagai tugas serta dijalankan untuk mensukseskan program PHBS.</p> <p>3. Terciptanya program yang berkelanjutan sehingga dapat terciptanya konsistensi untuk menjalankan dan mengembangkan program tersebut.</p> <p>1. Kegiatan sosialisasi dan komunikasi terkait PHBS tersampaikan dengan baik dan dapat diaplikasikan kepada kalangan masyarakat melalui pihak Puskesmas atau melalui bidan desa.</p> <p>2. Kegiatan yang dilakukan dalam mensosialisasikan dan mengkomunikasikan PHBS dapat berjalan dengan baik kemudian juga Puskesmas Kecamatan Polanharjo juga dapat menggerakkan kegiatan tersebut kepada masyarakat khususnya di Desa Keprabon dan Desa Sidowayah.</p>

	4. Pelaksanaan rancangan program PHBS	<p>1. Terciptanya pelaksanaan atau pengimplementasian program PHBS dengan baik dengan mengikuti arahan dan ketetapan yang telah dirancang</p> <p>2. Program PHBS menjadi program yang berkelanjutan dikarenakan adanya pelaksanaan kegiatan PHBS secara rutin oleh Puskesmas Kecamatan Polanharjo sehingga program PHBS dapat berjalan dengan baik.</p>
--	---------------------------------------	---

I. Metode penelitian

Menurut (Sarwono dkk, 2006) metode penelitian digambarkan sebagai sebuah cara untuk mencapai sebuah tujuan yang digunakan untuk meneliti sesuatu guna menemukan jawaban dan mencapai masalah tertentu. Metode penelitian biasanya dilakukan dengan teknik yang teliti dan sistematis. Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang biasanya digunakan guna meneliti kondisi objek yang bersifat alamiah. Posisi seorang peneliti yang nantinya akan menjadi instrument kunci, dan melakukan teknik pengumpulan data secara gabungan. Serta analisis data akan bersifat induktif, penelitian secara kualitatif akan condong kepada makna generalisasi (Moleong, 1999).

Didalam penelitian ini yang berjudul Sosialisasi dan Komunikasi Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten tentang PHBS di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten yang menyatakan bahwa akan menggunakan teori terkait dengan sosialisasi, komunikasi, dan PHBS. Menelaah bagaimana bentuk sosialisasi dari Pemerintah serta tindak lanjutnya dalam bentuk komunikasi guna menerapkan budaya PHBS di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten

yang nantinya akan kembali dianalisis serta diolah kembali datanya apakah Pemerintah sudah mencapai target yang berhasil ataupun masih jauh dari kata berhasil.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif-kualitatif.

Menurut (Salisa, 2010) penelitian kualitatif deskriptif bersumber kepada latar belakang lamiah yang mengandalkan seseorang sebagai manusia untuk objek penelitian dengan memanfaatkan metode kualitatif deskriptif proses akan jauh lebih menonjolkan proses daripada hasil dari penelitian.

Penelitian ini akan mengumpulkan data seoptimal mungkin dan yang nantinya akan dideskripsikan dengan sedemikian rupa. Data dari penelitian ini akan diperoleh dari Pemerintah dan Masyarakat Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. data-data yang nantinya akan diolah dan diteliti terletak pada wilayah tersebut. Penelitian ini akan mengunjungi tempat dimana data tersebut diperlukan seperti di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, Puskesmas Kecamatan Polanharjo, Desa Keprabon, Desa Sidowayah hingga wilayah masyarakat di kedua desa tersebut. Alasan peneliti memilih subjek lokasi tersebut dikarenakan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, Puskesmas Kecamatan Polanharjo, dan wilayah lingkungan masyarakat Kecamatan Polanharjo adalah lokasi tepat yang berurusan dengan PHBS guna dilakukannya penelitian ini.

c. Unit Analisis Data

Unit analisis data pada penelitian ini adalah:

Tabel 1.4

Tabel Unit Analisa

No	Unit Analisis	
1	Gangsar Agung Widardo, S.E.	Staff Kepala Bagian Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten
2	dr. H. Mulyono	Kepala Puskesmas Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten
3	Haryanto Wahyu Janasto & Mujahid, S.H.	Kepala Desa Keprabon dan Kepala Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten
4	Ida & Dewi	Masyarakat Desa Keprabon dan Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten

d. Jenis Data

Pada penelitian ini yang memiliki metode kualitatif, data tersebut dipadupadankan yang bersumber dari wawancara, dokumentasi, catatan, dan dokumen lainnya. Sehingga didalam penelitian ini menggambarkan fenomena nyata yang terjadi didalamnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berlandaskan kepada kapasitas subjek penelitian yang dirasa dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti secara tepat. (Arikunto, 2010)

e. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Suharsimi, 2006) pengumpulan data dilakukan guna memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan atau target penelitian. Didalam penelitian ini yang berjudul Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Dalam Mensosialisasikan Pola Hidup Bersih dan Sehat di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Tahun 2018 akan menggunakan dua teknik yaitu wawancara dan dokumentasi. Berikut penjelasan yang akan diuraikan.

1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan yang bertujuan untuk memperoleh hasil tertentu yang biasanya dilakukan oleh dua belah pihak, didalam wawancara peneliti akan melihat keadaan dari sebuah realita yang ada sehingga dapat memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan. Didalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa pihak terkait. Adapun pihak yang diwawancarai dalah sebagai berikut:

Tabel 1.5

Tabel Pihak Narasumber

No	Pihak yang akan diwawancarai	Kebutuhan data yang dibutuhkan
1	Kepala Bagian Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	-Program PHBS yang sudah dirancang ataupun yang akan dirancang -Agenda yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten untuk mensosialisasikan dan mengkomunikasikan program PHBS tersebut
2	Kepala Puskesmas Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten	-Program PHBS yang dijabarkan oleh Pemerintah/Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten yang nantinya akan diterapkan di Kecamatan Polanharjo -Kegiatan atau agenda yang akan dilakukan oleh pihak Puskesmas Kecamatan Polanharjo kepada masyarakat di Kecamatan Polanharjo
3	Kepala Desa Keprabon dan Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten	-Mengetahui bentuk sosialisasi dan komunikasi dari Pemerintah dan Puskesmas Kecamatan Polanharjo -Kegiatan atau agenda yang akan dilakukan oleh petinggi desa kepada masyarakat di Kecamatan Polanharjo
4	Warga di Desa Keprabon dan Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten	-Mengetahui reaksi dan tanggapan dari masyarakat itu sendiri terhadap Sosialisasi dan Komunikasi tentang PHBS

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang digunakan untuk memperoleh data sekunder, kemudian biasanya dilakukan dengan cara mencatat sumber tertulis, mengambil gambar, atau memuat beberapa dokumen pendukung yang bersifat valid untuk dimuat beberapa

pendapatnya yang berhubungan dengan penelitian terkait penelitian. Penelitian ini akan mengambil bentuk dokumentasi dalam bentuk sumber tertulis yang sudah divalidasi oleh pihak terkait dan pengambilan gambar di lokasi penelitian.

f. Teknik Analisa Data

Menurut (Arikunto, 2006), analisa data dilakukan melalui tahapan yang berurutan dengan pendekatan deskriptif yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Kemudian dikarenakan penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif, maka menurut (Arikunto, 2006) terdapat beberapa tahapan atau teknik analisis data yaitu antara lain:

1. Pengumpulan data

Hal ini berguna untuk menghimpun semua data yang diperoleh sehingga dapat relevan dengan hasil yang berada di lapangan.

2. Reduksi data

Reduksi data ialah mengkualifikasikan hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian. Biasanya berbentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, hingga menghapus hal yang dirasa tidak perlu. Sehingga data yang diberikan bisa lebih akurat.

3. Penyajian data

Menyusun penelitian dengan bentuk yang sistematis dan terstruktur sehingga menjadi lebih sederhana dan memudahkan dalam membuat sebuah kesimpulan

4. Kesimpulan

Merupakan tahapan akhir dari proses menganalisis data, peneliti menghimpun semua data yang telah diperoleh dan menjadikannya sebuah kesimpulan akhir berdasarkan data yang diperoleh dari observasi dan wawancara.